



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

ANTISIPASI UTANG NEGARA YANG TINGGI

Edmira Rivani

Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Fadila Puti Lenggo Geni

Analisis Legislatif Ahli Pertama
fadila.geni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sejak akhir tahun 2014, utang negara menjadi 3,3 kali lipat. Rasio utang terhadap PDB juga naik dari 27,46% pada 2015 menjadi 38,59%, dengan total utang mencapai Rp8.353 triliun pada 2023. Jika dilihat dari utang yang jatuh tempo, tahun 2024 pemerintah harus membayar utang mencapai Rp434,29 triliun, dengan rincian Rp371,8 triliun dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp62,49 triliun dalam bentuk pinjaman.

Meskipun utang dapat digunakan untuk mendukung perekonomian, apabila melebihi batas aman, akan muncul risiko yang cukup besar. Pemerintah perlu memerhatikan risiko jangka panjang, terutama terkait stabilitas ekonomi negara. Walaupun rasio utang terhadap PDB Indonesia masih berada di sekitar 32%, yang dianggap aman sesuai undang-undang, peningkatan utang ini tetap harus diantisipasi. Pemerintah perlu menyusun strategi pengelolaan utang yang tepat agar tidak menjadi beban di masa depan. Diversifikasi instrumen utang dan manajemen risiko yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Utang yang terlalu tinggi bisa memberikan citra buruk bagi investor internasional. Meski cadangan devisa serta aktivitas ekonomi internasional meningkat, ketergantungan yang berlebihan pada utang dapat merusak reputasi ekonomi suatu negara.

Idealnya utang negara harus difokuskan pada sektor produktif dan investasi jangka panjang. Beberapa sektor produktif yang dimaksud seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. Jika dilihat dari data kementerian keuangan, pada tahun 2014, belanja infrastruktur sebesar Rp154,7 triliun mengalami peningkatan tajam menjadi Rp410,7 triliun pada 2018, naik 265%, kembali naik menjadi Rp415 triliun pada 2019, dan tahun 2024 mencapai Rp422,7 triliun. Pengeluaran untuk pendidikan juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp353,4 triliun pada 2015 naik 226% menjadi Rp444,1 triliun pada 2018, mencapai Rp492,5 triliun pada 2019, dan Rp722,6 triliun pada anggaran APBN 2025. Belanja untuk kesehatan pun meningkat 186% dalam kurun waktu empat tahun, dari Rp59,7 triliun pada 2015 menjadi Rp111 triliun pada 2018, lalu naik lagi menjadi Rp160 triliun pada 2019. Sementara itu, belanja subsidi menurun drastis sebesar 73%, dari Rp350,3 triliun pada 2014 menjadi Rp94,5 triliun pada 2018, namun naik kembali pada APBN 2025 untuk subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp394,3 triliun dan subsidi nonenergi Rp131,3 triliun.

Kendati anggaran untuk sektor produktivitas terus meningkat, perlu diperhatikan pula anggaran tersebut apakah sudah tepat sasaran atau belum. Sebagai contoh, anggaran pendidikan sebagian besar dialokasikan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Hal ini dapat dilihat dari fakta pemerintah bisa menghabiskan miliaran rupiah untuk mengadakan acara seremonial atau pameran, bahkan ratusan miliar untuk membangun *platform*, tetapi tidak berhasil memenuhi pendanaan pendidikan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama. Akibatnya, anggaran pendidikan

belum diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban konstitusional yang seharusnya menjadi fokus utama. Selain masalah penyerapan di sektor pendidikan, sektor kesehatan juga mengalami kendala yang serupa Menurut Kebijakan Kesehatan Indonesia (KKI) menyatakan masih seringnya anggaran kesehatan tidak terserap untuk kegiatan kesehatan yang substantif pada tingkat daerah. Berdasarkan dari fakta ini, sejauh ini pemerintah sudah memfokuskan pada sektor produktif dalam mengelola keuangan, namun penting untuk pemerintah memperhatikan kembali objektifitas dalam membuat detail anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.

Atensi DPR

Jika utang negara tidak dikelola dengan baik, berpotensi menjadi beban besar bagi pemerintah di masa mendatang. Komisi XI DPR RI terutama perlu melakukan beberapa langkah strategis. seperti, pertama, memerhatikan dan menyusun detail anggaran berdasarkan evaluasi menyeluruh apakah penyerapan anggaran di sektor produktif sudah tepat sasaran, sehingga pemerintah tidak perlu berhutang lebih banyak jika sektor produktifnya sudah cukup. Dalam jangka panjang, beban negara yang lebih rendah akan mengurangi kebutuhan dana dengan utang. Kedua, komisi XI perlu ikut memerhatikan anggaran untuk kabinet baru supaya anggaran tersebut tepat sasaran dan meringankan beban anggaran. Ketiga, pemerintah perlu memerhatikan jatuh tempo utang yang membengkak dalam jangka waktu dekat agar diprioritaskan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konsekuensi pemerintah mengambil utang hanya untuk membayar bunga utang.

Sumber

cnbcindonesia.com, 11 dan 12 September 2024;
kemenkeu.go.id, 12 September 2024;
metrotvnews.com, 13 September 2024;
tribunnews.com, 12 September 2024;
unair.ac.id, 11 September 2024.

Minggu ke-2 September
(9 s.d. 15 September 2024)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyitah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.